

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012
DALAM PERSPEKTIF KERAHASIAAN PERBANKAN TERKAIT HARTA
BERSAMA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Oleh :

Kristiani

312013016



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA 2016

Lembar Persetujuan



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristiani
NIM : 312013016 Email : -Kristianisimamuntak3@gmail.com
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum
Judul tugas akhir : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012 DALAM
PERSFEKTIF KERAHASIAAN PERBANKAN TERKAIT HARTA BERSAMA
Pembimbing : Dr. Dyah Hapsari P,SM.,Hum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 17 September 2015



Kristiani

Tanda tangan & nama terang mahasiswa



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristiani
NIM : 312013016 Email : - Kristianismangunka3@gmail.com
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum
Judul tugas akhir : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012 DALAM
PERSFEKTIF KERAHASIAAN PERBANKAN TERKAIT HARTA BERSAMA

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatasnya bagi satu pihak saja, Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 17 Januari 2016


Kristiani

Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,



Dr. Dyah Hapsari P.S.M., Hum

Tanda tangan & nama terang pembimbing I

Tanda tangan & nama terang pembimbing II



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristiani

NIM : 312013016

Email : -

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul tugas akhir : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012 DALAM
PERSFEKTIF KERAHASIAAN PERBANKAN TERKAIT HARTA BERSAMA

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatashanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, Januari 2016

Kristiani

Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,

Dr. Dyah Hapsari P, SM, Hum

Tanda tangan & nama terang pembimbing I

Tanda tangan & nama terang pembimbing II

Lembar Persetujuan

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012
DALAM PERSPEKTIF KERAHASIAAN PERBANKAN TERKAIT HARTA
BERSAMA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum


Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Oleh:

Kristiani

312013016


Dr. Dyah Hapsari P. SM., Hum
Pembimbing

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

SALATIGA

DESEMBER 2016

Lembar Pengujian

KOMISI PENGUJI

PENGUJI I

Arie Siswanto, S.H., M.Hum

PENGUJI II

Dr. Dyah Hapsari P,SM.,Hum

PENGUJI III

Sri Harini Dwiyatmi, SH., M.S

DIUJI PADA TANGGAL 16 DESEMBER 2016

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Christina Maya Indah, S.,SH.,M.Hum

KATA PENGANTAR

Suatu karya ilmiah di bidang hukum haruslah ditulis dengan maksud untuk memberi ide atau gagasan baru yang berkaitan dengan asas dan kaidah hukum. Oleh karena itu untuk memberi ide atau gagasan baru yang dimaksud, Penulis ingin memberikan buah pemikiran tentang pembukaan kerahasiaan perbankan terkait harta bersama yang penulis fokuskan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64/puu-x/2012.

Magda Safrina, sebagai pemohon berkedudukan di Banda Aceh, mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gono-gini) terhadap suami Pemohon Gugatan perceraian dan pembagian harta bersama tersebut didaftarkan di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh Nomor 21/Pdt- G/2012/MS-BNA. Dari beberapa harta bersama tersebut terdapat sejumlah harta bersama dalam bentuk tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon di sejumlah Bank di Kota Banda Aceh dan Bank Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, untuk mengetahui kepastian mengenai harta bersama tersebut Mahkamah Syarian meminta sejumlah Bank termaksud untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud. Namun pihak Bank menolak memberikan keterangan dikarenakan hal tersebut menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah, hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PBI Nomor 2/19/PBI/2000

Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor 64/PUU-X/2012 perihal Pengujian Materiil Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ketentuan tersebut berbunyi “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A”. Pemohon merasa bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah menghalangi akses Pemohon untuk memperoleh keterangan mengenai harta bersama (harta gono-gini) Pemohon dengan suami Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memberi amar putusan bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian

Menurut pandangan penulis putusan Mahkamah Konstitusi telah memberi kepastian dan perlindungan bagi masyarakat terlebih dalam permohonan tersebut ialah Pemohon. memberikan kepastian kepada setiap orang untuk melindungi hartanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta sifat kerahasiaan perbankan yang dianut oleh Indonesia yaitu rahasia bank yang bersifat relative yang secara eksplisit telah diatur dalam Undang-Undang. Namun Menurut penulis terdapat kelemahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara atau permohonan pemohon tersebut yaitu sifat dari model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) tidak dapat secara langsung dilaksanakan (*non-self executing*) karena harus melalui proses legislasi baik dengan perubahan undang-undang maupun dengan pembentukan undang-undang dan proses regulasi untuk peraturan di bawah undang-undang.

Menurut penulis untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat dalam perkara perceraian mengenai harta bersama yang dimasukan dalam perbankan seharusnya lebih menekankan judicial review pada Pasal 43 UU No. 10 tahun 1998 bukan pada pasal 40 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998. Permohonan pada penekanan judicial review pada Pasal 43 UU No. 10 tahun 1998 dapat dilakukan untuk memberikan perluasan pengaturan bukan hanya terkait perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, namun juga meliputi perkara gugatan harta bersama dalam perkawinan yang digugat oleh nasabah sebagai harta bersama untuk sebagian atau seluruhnya yang disimpan dalam bank.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum.

Salatiga, 16 desember 2016

Kristiani

ABSTRAK

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal yang dirahasiakan bank ialah jumlah kekayaan nasabah, Biodata nasabah, pinjaman nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Berkaitan dengan itu, ketentuan Pasal 40 ayat (1) menentukan bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang dicatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dari pengecualin tersebut tidak ada pengaturan bahwa kerahasiaan perbankan dapat dibuka untuk kepentingan perceraian mengenai harta bersama. Dalam konteks terjadinya pengakhiran perkawinannya atau perceraian maka akan mengakibatkan bubarnya harta bersama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 199 KUH Perdata bubarnya harta persatuan dalam perkawinan terjadi jika adanya kematian, karena keadaan tak hadir, karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, dan karena perceraian. Dengan timbulnya masalah hukum tersebut pemohon mengajukan permohonan dengan nomor perkara Mahkamah Konstitusi nomor 64/PUU-X/2012 dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.

Kata kunci : ***Kerahasiaan Perbankan terkait harta bersama, Mahkamah Konstitusi nomor 64/PUU-X/2012***

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGUJIAN	ii
LEMBAR UJIAN HASIL SKRIPSI	iii
LEMBAR UJIAN HASIL SKRIPSI	iv
LEMBAR UJIAN HASIL SKRIPSI	v
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN 1	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Metode Penelitian	13
1.6 Sistematika Penulisan Hukum	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN	
A. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama dan Perceraian	17
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama	17
2.1.2 Pengertian Perceraian dan Pengaturannya	19
2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Syariah	22

2.2 Pengertian dan Dasar Hukum Rahasia Bank	23
2.2.1 Peraturan Bank Indonesia nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Ijin Tertulis Membuka Rahasia Bank	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi	27
2.4 Teori Argumentasi Hukum	33
B. PEMBAHASAN	39
A. Temuan Data	39
B. Analisis	55
BAB III PENUTUP	
3.1. Kesimpulan	63
3.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65